

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pendidikan kejuruan sebagai salah satu bentuk investasi pendidikan yang diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengembangan kualitas sumber daya manusia. Salah satu bentuk pendidikan kejuruan, adalah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Jenjang pendidikan menengah ini memiliki tujuan utama yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yaitu “.....mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu”. Berdasarkan tujuan tersebut, pemerintah pada tahun 2005 mencetuskan kebijakan untuk menjadikan perbandingan jumlah SMK dan SMA (70:30). Hal ini dikemukakan oleh Mendiknas Bambang Sudibyo, komitmen tersebut sangat diperlukan agar lulusan SMK bisa terserap di berbagai lapangan pekerjaan yang ada. Komitmen itu sekaligus juga untuk mengurangi angka pengangguran.

Sekolah Menengah Kejuruan merupakan lembaga pendidikan kejuruan yang mempunyai tujuan untuk mempersiapkan siswa menjadi tenaga kerja yang kompeten dan mandiri dengan mengutamakan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan jurusannya. Menurut Sukmadinata (2011) pendidikan kejuruan bertujuan untuk menghasilkan manusia yang produktif, yakni manusia kerja bukan manusia beban bagi keluarga, masyarakat, dan bangsanya. SMK merupakan pendidikan pada jenjang menengah yang mengutamakan pengembangan keterampilan siswa. Proses pembelajaran di SMK harus dapat menyediakan serangkaian kegiatan nyata dan masuk akal atau dapat dimengerti oleh siswa dan memungkinkan terjadinya interaksi sosial, oleh karenanya dalam proses pembelajaran siswa harus terlibat langsung dalam kegiatan yang memungkinkan siswa membangun makna bagi diri sendiri.

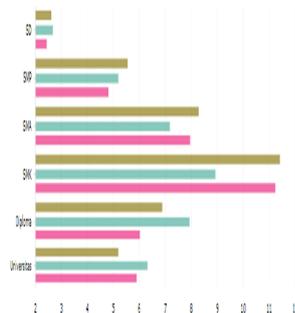
Pendidikan kejuruan memiliki karakteristik khusus yang membedakan dari pendidikan pada umumnya. Karakteristik dipersepsikan pada hubungannya dengan parameter potensial yang menjadi kontrol terhadap tujuan penyiapan individu, yang berdaya guna dan memiliki manfaat lebih sebagai tenaga kerja.

Kedua pernyataan di atas mengandung kesamaan, yakni mempersiapkan peserta didik sebagai calon tenaga kerja dan mengembangkan eksistensi peserta didik untuk kepentingan peserta didik, masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan hal tersebut hendaknya penyelenggaraan pendidikan kejuruan harus berdasarkan pada kebutuhan Dunia Usaha/Dunia Industri (DU/DI), yakni dapat mengembangkan tenaga kerja yang *marketable* (orientasi pada pasar kerja).

Rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan masalah mendasar yang dapat menghambat pembangunan dan perkembangan ekonomi nasional. Penataan sumber daya manusia perlu terus diupayakan secara bertahap dan berkesinambungan melalui sistem pendidikan yang berkualitas baik pada jalur pendidikan formal, informal, maupun nonformal, sejak mulai dari pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi. Pentingnya pengembangan sistem pendidikan yang berkualitas perlu lebih ditekankan, karena berbagai indikator menunjukkan bahwa pendidikan yang ada belum mampu menghasilkan sumber daya sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan pembangunan. Menurut data penilaian yang dilakukan oleh *The programme for International Student Assessment (PISA)* pada tahun 2012 Indonesia mendapatkan skor di bawah rata-rata, yaitu skor matematika anak-anak Indonesia hanya 375, rata-rata skor membaca 396, dan rata-rata skor untuk sains 382 dari skor rata-rata seluruh peserta secara berurutan 494,496, dan 501. Pendidikan di Indonesia selalu dihadapkan dengan persoalan mutu, relevansi, efektivitas dan efisiensi pendidikan. Mutu pendidikan Indonesia masih rendah dibanding dengan negara lain, relevansi hasil pendidikan tidak sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional, serta pengelolaan lembaga pendidikan kurang berdaya guna dan berhasil guna.

Menurut Suryadi (2014) pada tahun 2010 pertambahan signifikan pendaftar SMK menjadi lebih besar dibanding dengan SMA dengan prosentase 55% untuk SMK dan SMA menjadi 45%. Rasio meningkatnya jumlah pendaftar SMK yang sangat signifikan tersebut akan berakibat pada bertambahnya jumlah angkatan kerja. Tetapi jika jumlah angkatan kerja lulusan SMK tersebut tidak dibarengi dengan kompetensi yang memadai yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, maka pertumbuhan pengangguran lulusan SMK akan lebih besar lagi. Padahal Suryadi (2010) mengungkapkan jika suatu lembaga pendidikan kejuruan

menghasilkan lulusan yang banyak penganggurannya maka suatu satuan, jenjang atau jenis pendidikan dapat dikatakan kurang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan nasional. Dengan banyaknya penganggur terdidik, pendidikan dapat juga dikatakan kurang mampu mendorong tumbuhnya pertumbuhan perekonomian nasional bahkan mungkin dapat menjadi kendala pertumbuhan. Dengan banyaknya tenaga terdidik yang menganggur, menunjukkan bahwa pendidikan belum relevan dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan.



**Gambar 1.1 Persentase Pengangguran Menurut Tingkat Pendidikan**

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik tingkat pengangguran dari lulusan Sekolah Menengah Kejuruan paling tinggi dibanding dengan lulusan dari jenjang pendidikan lainnya. Angka pengangguran dari lulusan SMK pada Agustus 2018 mencapai 11,25%. Tingkat pengangguran tersebut lebih tinggi dari Februari 2018 sebesar 8,92% namun lebih rendah dibanding posisi Agustus 2017 sebesar 11,41%. Tingkat pengangguran lulusan SMK lebih tinggi dibanding lulusan dengan jenjang pendidikan yang setara, yakni Sekolah Menengah Atas (SMA) maupun lulusan lainnya seperti terlihat pada grafik di bawah ini. Angka pengangguran dengan jenjang pendidikan universitas pada Agustus 2018 sebesar 5,89%, lulusan diploma 6,02%, lulusan SMA 7,95%, lulusan SMP 4,8%, dan lulusan SD 2,43%. Lebih lanjut Suryadi (2014) mengungkapkan bahwa persoalan relevansi merupakan masalah serius karena bisa menjadi manfaat dan keuntungan besar atau sebaliknya dapat menyebabkan persoalan-persoalan yang tidak ada habisnya. Akan tetapi jika pendidikan mampu menghasilkan lulusan yang memiliki keterampilan relevan dengan kebutuhan berbagai jenis lapangan kerja di berbagai

sektor ekonomi, maka kenaikan angkatan kerja berpendidikan lebih tinggi memiliki efek ganda terhadap pertumbuhan.

Menurut Suryadi (2010) pada faktanya pengembangan kurikulum dan program keahlian pada satuan pendidikan dilaksanakan secara terpisah dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang mengakibatkan pendidikan di SMK tidak bisa memenuhi kebutuhan dunia usaha dan industri. Hal tersebut akan berdampak pada jenis program studi, isi pendidikan, media belajar, dan evaluasi serta mekanisme sertifikasi sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah. Hasilnya program pendidikan di SMK tidak relevan dengan kompetensi yang dibutuhkan dunia usaha dan industri. Hal ini mengakibatkan angka pengangguran sangat tinggi dan ironisnya menimpa lulusan SMK. Permasalahan yang telah disebutkan di atas disebabkan oleh tidak adanya kesesuaian antara materi yang diajarkan di dunia pendidikan dan kebutuhan dunia industri sebagaimana disampaikan dalam "*Participation in the World Business and Industry Expertise on Improving Student of SMK N 6 Bandung*" oleh Lasmaria (2013) salah satu penyebab sulitnya siswa SMK terserap di dunia kerja adalah karena masih lemahnya komunikasi yang terjalin antara SMK dengan DU/DI.

Menurut Sudjana (2013) hasil belajar adalah kemampuan kemampuan yang dimiliki siswa setelah ia menerima pengalaman belajarnya. Pengalaman belajar akan didapat oleh siswa selama proses belajar di sekolah, oleh karena itu guru harus mempersiapkan perangkat pembelajaran dengan maksimal.

Perangkat pembelajaran merupakan sarana yang mendukung proses pembelajaran, sehingga tujuan belajar dapat tercapai dengan efektif. Dalam proses pembelajaran, guru harus mempersiapkan segala perangkat, seperti menetapkan materi pelajaran, model/strategi yang akan diterapkan, lembar kerja siswa, menentukan buku-buku sebagai sumber belajar yang harus dibaca oleh siswa, cara siswa menindaklanjuti pelajaran, cara mempersiapkan siswa dalam belajar, dan cara mengukur hasil belajar (Callahan, 1992). Guru yang tidak membuat perencanaan dan mempersiapkan segala perangkat yang diperlukan, pelajaran yang dilaksanakan tidak tajam, tidak menarik, dan tujuan pembelajaran tidak tercapai.

Gitakarma M.S (2014) dalam penelitiannya yang dilakukan di SMK kompetensi keahlian TKJ Buleleng Provinsi Bali masih melihat pembelajaran yang masih didominasi oleh kegiatan mengajar yang diarahkan oleh perangkat pembelajaran “konvensional” dengan kegiatan pembelajaran dimana guru lebih banyak menyampaikan informasi dengan metode ceramah. Pada saat kegiatan praktek di laboratirum komputer umumnya siswa diberikan untuk melihat dan mengamati saja, guru memberikan contoh seringkali tanpa diikuti praktek oleh siswanya. Sehingga siswa tidak bisa memahami konsep jaringan komputer sebenarnya dan hal ini menyebabkan siswa dalam menghadapi kasus-kasus tertentu di jaringan komputer masih belum dapat menyelesaikannya.

Permasalahan yang sama juga ditemukan oleh Hamid (2016), bahwa pembelajaran proses belajar pada mata pelajaran sistem operasi jaringan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Limboto yang belum maksimal. Lebih lanjut Hamid (2016) juga menyebutkan salah satu faktor penghambat dalam proses pembelajaran sistem operasi jaringan di Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Limboto adalah pesan utama materi pembelajaran yang sulit dipahami oleh siswa karena media yang digunakan kurang menarik dan terasa membosankan. Padahal mata pelajaran sistem operasi jaringan merupakan salah satu mata pelajaran wajib untuk paket keahlian teknik komputer dan jaringan.

Proses pembelajaran yang dilaksanakan tanpa persiapan yang matang akan mengakibatkan peserta didik tidak mendapatkan pengalaman belajar yang semestinya seperti yang sudah ditetapkan dalam tujuan pendidikan. Guru harus bisa memanfaatkan segala sumber belajar untuk memberikan pengalaman terbaik pada siswa agar kompetensi yang di butuhkan dapat dicapai oleh siswa. Sejatinya Siswa SMK TKJ harus mendapatkan proporsi pembelajaran yang lebih menitik beratkan pada praktek yang berbasis pada DU/DI, tapi hal tersebut akan mustahil tercapai jika dalam pembelajaran praktek masih saja menggunakan metode-metode lama yang tidak menarik dan membosankan bagi siswa.

Kemendikbud melalui ditjen pembinaan guru pendidikan dasar, Elvira mengatakan, saat ini jumlah guru yang sudah bersertifikat sudah sebanyak 3,1 juta, sisanya 570 ribu belum sertifikasi (<http://www.merdeka.com>, 2018). Permasalahan tersebut terus berlanjut pada pemenuhan guru produktif TKJ yang

sudah memiliki sertifikat pendidik. Nurita (2015) dalam penelitiannya yang dilakukan di Kabupaten Gresik dengan tujuh SMK yang diteliti, keseluruhannya ada 28 guru dan hanya terdapat satu guru yang dinyatakan profesional dari segi administrasi dan dari segi kompetensi.

Menurut Carman (2003) keterampilan pokok yang harus dikuasai dalam rangka masuk dalam dunia kerja adalah: (1) keterampilan yang berbasis tempat kerja (*Basic Workplace Skills*) yang meliputi keterampilan membaca, menulis dan berhitung; (2) pengetahuan yang berbasis tempat kerja (*Basic Workplace Skills*) yang meliputi konsep-konsep pengetahuan tentang keselamatan kerja, proses produksi, struktur organisasi dan budaya kerja serta prinsip-prinsip dasar keuangan; (3) keterampilan yang berbasis kemampuan kerja (*Basic Employability Skills*) yang meliputi keterampilan kerja tim, penyelesaian masalah, membuat keputusan, mendemonstrasikan manajemen diri, menjalin hubungan dengan relasi.

Hall (1978) mengemukakan bahwa hubungan teori dengan kenyataan dalam praktik tidak dapat dielakkan atau teori merupakan ketentuan-ketentuan yang dapat dipraktikkan, sehingga dari pernyataan ini dapat diartikan bahwa pembelajaran praktik merupakan kegiatan untuk melakukan suatu pembelajaran teori. Pendidikan kejuruan erat kaitannya dengan sarana dan prasarana praktik dalam menunjang proses pembelajaran praktik untuk bisa mencapai kompetensi yang diharapkan sebagaimana dikatakan oleh Clarke & Winch (2007) bahwa pendidikan kejuruan adalah pendidikan yang menyiapkan anak muda dan remaja untuk memasuki dunia kerja kemudian dalam proses pembelajarannya berkaitan dengan masalah teknik dan praktik, sehingga pendidikan kejuruan erat kaitannya dengan sarana dan prasarana praktik dalam menunjang proses pembelajaran praktik. Proses pembelajaran praktik menuntut adanya kelengkapan fasilitas yang dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk menunjang pencapaian kompetensi siswa.

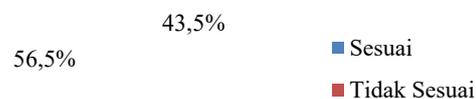
Dalam Permendiknas Nomor 40 Tahun 2008 tentang standar sarana prasarana untuk SMK/MAK disebutkan bahwa standar sarana dan prasarana untuk SMK/MAK mencakup kriteria minimum sarana dan kriteria minimum prasarana, kemudian dalam pasal 4 Permendiknas No. 40 Tahun 2008 disebutkan

bahwa penerapan standar sarana dan prasarana di SMK dimulai sejak peraturan tersebut dibuat, dan selambat-lambatnya 5 (lima) tahun setelah peraturan tersebut ditetapkan. Namun masih banyak sekolah yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh pemerintah, salah satunya terjadi di Kabupaten Sukoharjo. Susanto dan Sudira (2016) dalam penelitiannya ia mendapati dari 16 SMK penyelenggara kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan di Kabupaten Sukoharjo terdapat 4 (25%) SMK yang memiliki area praktik kerja teknik mekanik elektro, 16 (100%) SMK memiliki ruang praktik instalasi jaringan, 11 (69%) SMK memiliki area praktik perbaikan dan perawatan komputer dan 8 (50%) SMK memiliki ruang penyimpanan dan instruktur. Data tersebut hanya penyediaan area untuk praktikum, lebih lanjut Susanto dan Sudira menyimpulkan berdasarkan analisis data secara keseluruhan bahwa tingkat pemenuhan standar sarana dan prasarana praktik pada SMK paket keahlian TKJ di Kabupaten Sukoharjo belum memenuhi standar.

Untuk mencapai tujuan utama pendidikan kejuruan yang tercantum dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003, dibutuhkan kurikulum, perencanaan pembelajaran, proses pembelajaran, guru yang profesional, sarana dan prasarana yang dapat menunjang serta sistem evaluasi yang dapat mengukur sejauh mana ketercapaian kompetensi oleh siswa. Hasil evaluasi tersebut bisa dijadikan bahan untuk perbaikan atau usaha meningkatkan standar yang lebih baik. Baharuddin (2016) dalam tesisnya yang berjudul evaluasi pelaksanaan pembelajaran produktif teknik komputer jaringan di SMKN 1 Sengkang mendapati evaluasi terhadap penilaian/hasil pembelajaran pada kategori cukup baik dengan rata-rata persentase 74,82%. Persentase tersebut cukup memberikan gambaran bahwa pelaksanaan evaluasi penilaian/hasil pembelajaran yang belum maksimal, indikator yang digunakan oleh Baharuddin adalah; Melaksanakan penilaian pembelajaran, Penilaian perilaku siswa dalam pembelajaran, Mengklarifikasikan hasil pembelajaran, Penilaian hasil pembelajaran.

Tidak mengherankan jika masih banyak ditemui lulusan SMK TKJ ataupun kompetensi keahlian SMK lainnya banyak yang tidak terserap oleh lapangan kerja jika permasalahan-permasalahan diatas terus dialami oleh sekolah.

Kebijakan pemerintah tentang revitalisasi SMK didasari oleh lulusan SMK yang banyak menganggur dan bekerja tidak simetris dengan keahlian yang dimiliki. Penyebabnya bisa saja dari penyelenggaraan pendidikan yang masih belum maksimal, sehingga siswa tidak mendapatkan kompetensi yang memadai untuk bekerja pada DU/DI. Penyelenggaraan SMK di Eropa dan beberapa negara maju di Asia sudah membuktikan bahwa SMK mampu mendorong perkembangan perindustrian dan dunia usaha. Swiss merupakan negara yang telah cukup lama menerapkan *Dual Vocational Education and Training (D-VET) System* dan membuktikan diri sebagai negara dengan tingkat pengangguran pekerja muda yang rendah dan mencapai produktivitas yang tinggi. Sedangkan pendidikan kejuruan di Indonesia masih berusaha keluar dari masalah relevansi, seperti penelitian yang dilakukan oleh Patawari (2016), ia mendapati masih banyaknya lulusan SMK kompetensi keahlian TKJ yang bekerja tidak pada bidangnya bahkan yang tidak terserap lapangan kerja. Penelitian tersebut dilakukan terhadap lulusan SMK kompetensi keahlian TKJ di makasar, sampel penelitian berjumlah 115 lulusan yang lulus pada tahun 2010 s/d 2015.



**Gambar 1.2 Relevansi Kompetensi Keahlian Lulusan SMK TKJ terhadap Kompetensi Keahlian yang Dibutuhkan DUDI**

Berdasarkan Gambar 1.2, dari 23 lulusan SMK TKJ yang bekerja, 43,5% (10) lulusan bekerja pada DUDI yang sesuai dengan kompetensi keahlian TKJ yang dimiliki lulusan dan 56,5% (13) lulusan bekerja pada DUDI yang tidak sesuai dengan kompetensi keahlian TKJ yang dimiliki lulusan. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak lulusan yang bekerja pada DUDI/ instansi yang tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki lulusan. Selanjutnya, pengelompokan lulusan SMK TKJ berdasarkan relevansi kompetensi keahlian yang dimiliki lulusan terhadap kompetensi keahlian yang dibutuhkan DUDI berdasarkan klasifikasi wilayah dapat dilihat pada Gambar 1.2.



**Gambar 1.3 Relevansi Kompetensi Keahlian Lulusan SMK TKJ terhadap Kompetensi yang Dibutuhkan DUDI Wilayah Urban**

Berdasarkan Gambar 1.3, dari 19 lulusan SMK TKJ wilayah urban yang bekerja, 47,5% (9) lulusan bekerja pada DUDI yang sesuai dengan kompetensi keahlian TKJ yang dimiliki lulusan dan 52,6% (10) lulusan bekerja pada DUDI yang tidak sesuai dengan kompetensi keahlian TKJ yang dimiliki lulusan. Ini menunjukkan bahwa lebih banyak lulusan yang bekerja pada DUDI/ instansi yang tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki lulusan. Adapun pengelompokan lulusan SMK TKJ berdasarkan relevansi kompetensi keahlian yang dimiliki lulusan terhadap kompetensi keahlian yang dibutuhkan DUDI wilayah rural dapat dilihat pada Gambar 1.3.



**Gambar 1.4 Relevansi Kompetensi Keahlian Lulusan SMK TKJ terhadap Kompetensi yang Dibutuhkan DUDI Wilayah Rural**

Berdasarkan Gambar 1.4, dari 4 lulusan SMK TKJ wilayah rural yang bekerja, 25% (1) lulusan bekerja pada DUDI yang sesuai dengan kompetensi keahlian TKJ yang dimiliki lulusan dan 75% (3) lulusan bekerja pada DUDI yang tidak sesuai dengan kompetensi keahlian TKJ yang dimiliki lulusan. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar lulusan yang bekerja pada DUDI/ instansi yang tidak sesuai dengan kompetensi keahlian yang dimiliki lulusan.

Kurikulum merupakan sentral dari arah penyelenggaraan pendidikan, kurikulum yang tidak relevan dengan kebutuhan akan berakibat fatal terhadap kualitas yang dihasilkan oleh satuan atau institusi pendidikan. Untuk mencapai relevansi antara pendidikan kejuruan dengan industri serta dunia usaha, dibutuhkan

kerjasama dari sedikitnya empat kementerian yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Perekonomian. Pelaku industri dan pelaku usaha memberikan *skill* dan kompetensi yang teridentifikasi untuk kemudian diajukan dalam penyusunan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI)

Pemerintah telah menetapkan SKKNI yang merupakan kerangka dasar acuan bagi lembaga pendidikan untuk menghasilkan tenaga ahli yang sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan oleh dunia industri. Untuk bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK), penyelenggaraan ujian sertifikasi profesi bidang TIK dikembangkan dan dikelola oleh Balai Pelatihan dan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (BPPTIK). Selanjutnya, berdasarkan SK Kepala LAN Nomor 489/K.1/PDP.10.4, Balitbang SDM Kementerian Kominfo diberikan status akreditasi sebagai instansi pengakreditasi lembaga diklat teknis di bidang TIK. Dengan akreditasi tersebut, maka BPPTIK yang berada di bawah Balitbang SDM Kementerian Kominfo memiliki kewenangan menyelenggarakan diklat teknis di bidang TIK untuk ASN di seluruh Indonesia, dan memiliki kewenangan untuk memberikan dan mencabut akreditasi lembaga diklat di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan diklat teknis di bidang TIK.

Berdasarkan pernyataan permasalahan diatas, penulis fokus untuk meneliti sejauh mana kesesuaian kurikulum kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dengan kebutuhan dunia industri agar tercipta *link and match* antara sekolah dengan dunia usaha dan dunia industri.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

### 1) Rumusan Masalah Umum

Masalah umum dalam penelitian ini yaitu **“Sejauh mana Relevansi Kurikulum Kompetensi Keahlian Teknik Komputer Dan Jaringan Dengan Tuntutan SKKNI?”**.

### 2) Rumusan Masalah Khusus

Berdasarkan pernyataan masalah umum diatas, berikut ini adalah penjabaran masalah khusus untuk lebih memfokuskan penelitian ini, maka dirumuskan dalam bentuk pemetaan sebagai berikut :

1. Bagaimana relevansi rumusan tujuan dalam kurikulum kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dengan tuntutan SKKNI?
2. Bagaimana relevansi isi dalam kurikulum kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dengan tuntutan SKKNI?
3. Bagaimana relevansi proses pembelajaran dalam kurikulum kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dengan tuntutan SKKNI?
4. Bagaimana relevansi evaluasi belajar dalam kurikulum kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dengan tuntutan SKKNI?

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1) Tujuan Umum

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kesesuaian kurikulum kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri yang di representasikan oleh SKKNI dengan melakukan kajian pada komponen-komponen kurikulum.

#### 2) Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut dapat dirincikan sejumlah tujuan khusus, sebagai berikut :

1. Mengetahui relevansi antara tujuan kurikulum kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dengan tuntutan SKKNI.
2. Mengetahui relevansi antara isi kurikulum kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dengan tuntutan SKKNI.
3. Mengetahui relevansi proses pembelajaran dalam kurikulum kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dengan tuntutan SKKNI.
4. Mengetahui relevansi hasil evaluasi kurikulum kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan dengan tuntutan SKKNI.

### **D. Manfaat Penelitian**

Secara spesifik hasil dari penelitian ini diharapkan berguna untuk:

- 1) Bagi sekolah, bisa menjadi bahan masukan untuk perbaikan kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di dunia usaha dan dunia industri. Sebagus apapun kurikulumnya jika tidak sesuai

dengan analisis kebutuhan, maka akan dipastikan tidak memberikan manfaat bagi siswa untuk membekali kehidupannya.

- 2) Bagi dunia industri, dapat menjadi data penting mengapa tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan, sehingga menjadi bahan masukan untuk kurikulum pelatihan (training) sebelum bekerja. Selain itu, jika dunia industri berkenan memberikan informasi tentang tuntutan kompetensi untuk bekerja pada perusahaanya kepada sekolah maka sekolah dapat mempersiapkan peserta didik untuk memenuhi tuntutan kompetensi tersebut.
- 3) Bagi dunia penelitian pendidikan kurikulum kejuruan, akan menjadi landasan penelitian lebih lanjut tentang evaluasi relevansi kurikulum kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan.

### **E. Definisi Operasional**

Definisi operasional disusun agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menafsirkan istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, penulis akan paparkan pengertian atau definisi operasional dalam penelitian ini antara lain :

#### 1) Relevansi

Menurut kamus besar bahasa indonesia, relevansi diartikan sebagai hubungan, kesesuaian, kaitan dengan tujuan berguna secara langsung apa yang dibutuhkan..

#### 2) Kurikulum

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 didefinisikan sebagai Seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.

#### 3) TKJ

Teknik komputer dan jaringan (TKJ) adalah suatu kompetensi keahlian yang dalam spektrum keahlian SMK yang termasuk dalam bidang keahlian teknologi informasi dan komputer, dan program keahliannya teknik komputer dan informatika.

#### 4) SKKNI

Standar kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) adalah uraian kemampuan yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan dan serta sikap kerja minimal yang harus dimiliki seseorang untuk menduduki jabatan tertentu yang berlaku secara nasional (BNSP, 2012).

Stake, R.E. (1967). "The Countance of Educational Evaluation. (On-line).  
<http://www.ed.uiuc.edu/circe/Publications/Countanance.pdf>. (27 Oktober 2017).

Setyoko, Allan., Tunas, Billy., Sunaryo, Widodo. (2016). "Evaluation of School Operational Assistance by using CIPP Model in Indonesia Private Islamic Elementary School." *International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)*, 4 (3), hlm. 44-49.

///

Susanto, R. & Sudira, P. (2016). "Evaluasi Sarana Dan Prasarana Praktik Teknik Komputer Dan Jaringan Di Smk Kabupaten Sukoharjo". *Jurnal Pendidikan Vokasi*, 6 (1), hlm. (54-65)

Nurita, V. (2015). Studi kompetensi guru profesional bidang keahlian teknik komputer dan jaringan (TKJ) di SMK Se-Kabupaten Gresik. (Online).  
<http://www.mulok.library.um.ac.id/index3.php/71936.html>. (19 Maret 2019)

Hamid, A. et al. (2016). "Media Pembelajaran Multimedia Interaktif Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Siswa Pada Mata Pelajaran Sistem Operasi Jaringan (Studi Kasus: Kelas XI TKJ di SMK Negeri 1 Limboto)". (Online). <http://ft.ung.ac.id/ejurnal-file/60me9jh8sf.pdf>. (19 Maret 2019)

- Gitakarma M.S. (2014). “Pengembangan Perangkat Pembelajaran Jaringan Komputer Berbasis Model Pembelajaran Pbl Untuk Meningkatkan Kompetensi Dan Kemampuan Berpikir Kritis Kreatif Siswa Smk Tkj Di Buleleng”.Seminar Nasional Inovatif II, hlm. 1-12.
- Callahan, J. F. et al., (1992). Teaching in The Midle and Scondary School. 4th Ed. New York: Macmillan Publishing Company.
- Sudjana, Nana. (2013). Penilaian Hasil Proses Belajar Mengajar. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Carman, P.S., & Watson, H. (2003). Framework for work-based foundationskills. In P. King & T.Ferro Eds, Second Eastern Regional Adult Education Research Conference Proceedings. University Park, PA: Collage of Education, Penn State University.
- Clarke, L., & Winch, C. (2007). Vocational education, international approaches, developments and systems. New York: Routledge 270, Madison Avenue, NY 10016.
- Hall, C.S., Lindzey, G., & Campbell, J.B. (1998).Theories of personality. New York: John Wiley.